

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	Sinergi Indonesia-Australia Garap Rantai Pasok Mineral Kritis	petrominer.com	2
2.	Memarkir Devisa Hasil Ekspor SDA untuk Memperkokoh Daya Tahan Ekonomi	indonesia.go.id	4
3.	Wamen ESDM: Usulan RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara Masih Digodok DPD RI	industri.kontan.co.id	8
4.	ESDM Mulai Petakan Proyek Hilirisasi yang Akan Dibiayai Danantara	bloombergtechnoz.com	9

Sinergi Indonesia-Australia Garap Rantai Pasok Mineral Kritis

PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerjasama dengan Northern Territory (NT) Australia untuk mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kerjasama ini akan berfokus pada rantai pasok mineral kritis dan strategis, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, sekaligus mendukung upaya NT Australia untuk diversifikasi pasokan mineralnya.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arie Havas Oegroseno, menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan tidak hanya dengan negara, tetapi juga dengan negara bagian yang memiliki kapasitas signifikan dalam industri mineral kritis.

“Nota Kesepahaman ESDM dengan NT Australia ini dapat menjadi model bagi Pemerintah Indonesia untuk melihat berbagai negara bagian penting dan strategis di Australia untuk bekerja sama,” ungkap Arie pada acara Sosialisasi Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis, Selasa (18/2).

Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis ini ditandatangani kedua belah pihak pada 12 November 2024. Sebagai implementasi kerja sama ini, pada April 2025 akan diselenggarakan Roadshow Mineral Indonesia-NT Australia, berupa kunjungan perusahaan pertambangan Indonesia ke NT, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Sulawesi (Sorowako dan Morowali) atau Maluku (Teluk Weda) pada Mei 2025.

Tak hanya itu, pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan studi dan pengembangan bersama dalam eksplorasi teknologi pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Juga pengembangan keahlian dan pelatihan dengan pembentukan program pendidikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, muatan kerja sama ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan. Fokus kebijakan pengembangan mineral dan batubara Indonesia mengacu pada tujuan utama yang mencerminkan keseimbangan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Fokusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan prioritas pada penelitian, inovasi, dan eksplorasi untuk memperkuat keamanan cadangan mineral,” jelas Dadan.

Menurutnya, dekarbonisasi industri pertambangan adalah langkah penting, melibatkan adopsi energi terbarukan, elektrifikasi operasi pertambangan, dan teknologi canggih. Indonesia juga menerapkan praktik untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem alam, memastikan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia, Hon Robyn Cahill, menyampaikan harapannya agar kemitraan ini dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama konkret di tingkat industri dan pemerintah.

“Sumber daya kami terus bertambah setiap hari, kami menemukan cadangan dan peluang baru, terutama di sektor mineral kritis. Banyak organisasi dan bisnis telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di wilayah kami karena peluang yang signifikan,” ujar Cahill.

Sumber: petrominer.com

Memarkir Devisa Hasil Ekspor SDA untuk Memperkokoh Daya Tahan Ekonomi

INDONESIA selalu meraih surplus perdagangan dari ekspor nonmigas selama lima tahun berturut-turut. Sepanjang 2024 saja, tercatat surplus sebesar USD31,04 miliar. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar USD51,44 miliar dan defisit migas sebesar USD20,40 miliar.

Dijelaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Minggu (19/1/2025), surplus nonmigas Indonesia 2024 sebagian besar disumbang oleh perdagangan dengan beberapa negara mitra dagang. Amerika Serikat (AS) menjadi penyumbang surplus terbesar dengan USD16,84 miliar, diikuti India USD15,39 miliar, Filipina USD8,85 miliar, Malaysia USD4,13 miliar, dan Jepang USD3,71 miliar.

Sedangkan, neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2024 membukukan surplus sebesar USD2,24 miliar. Dengan capaian surplus ini, neraca perdagangan Indonesia meneruskan tren surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Desember 2024 didorong surplus nonmigas sebesar USD4,00 miliar dan defisit migas sebesar USD1,76 miliar.

Sektor dengan peningkatan ekspor paling signifikan dibanding tahun sebelumnya terjadi pada sektor pertanian sebesar 29,81 persen diikuti industri 5,33 persen. Sedangkan, ekspor sektor pertambangan turun 10,20 persen.

Beberapa produk utama ekspor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada 2024, antara lain, kakao dan olahannya (kode barang ekspor/impor HS 18) sebesar 118,63 persen; barang dari besi dan baja (HS 73) 101,10 persen; aluminium dan barang daripadanya (HS 76) 70,07 persen; kopi, teh, dan rempah-rempah (HS 09) 67,27 persen; serta tembaga dan barang daripadanya (HS 74) 51,11 persen (CtC).

Tiga raksasa ekonomi dunia, Tiongkok, AS, dan India masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia pada 2024 dengan nilai mencapai USD106,86 miliar. Ketiga negara ini berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

Sementara itu, ekspor nonmigas Indonesia ke beberapa negara pada 2024 dengan peningkatan terbesar, antara lain, ke Australia sebesar 60,58 persen diikuti Rusia 44,04 persen, Brasil 34,84 persen, Turkiye 25,97 persen, dan Vietnam 25,04 persen.

Mengacu dari kondisi positif ekspor nonmigas Indonesia tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, (17/2/2025).

“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

“Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Kepala Negara.

Kendati demikian, dari beleid tersebut eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

Poin lainnya dalam PP itu adalah, DHE itu bisa digunakan untuk pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.

Kemudian, DHE yang diparkir di rekening dalam negeri itu juga dapat digunakan untuk pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Agunan Kredit

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menambahkan DHE SDA dapat dijadikan agunan kredit dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari persyaratan persetujuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Seperti yang tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2025, DHE yang dijadikan agunan itu bisa berbentuk giro, deposito, dan tabungan yang memenuhi persyaratan untuk dikecualikan dari BMPK.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan penyesuaian Surat Eksekutif (SE) Kepala Eksekutif OJK kepada bank umum terkait dengan penegasan pemanfaatan DHE SDA sebagai agunan. "Atau bisa digunakan sebagai back to back loan dan kepada LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) mengenai formulir rincian penerimaan DHE SDA," ujar Menko Airlangga, Senin (17/2/2025).

Implementasi aturan DHE SDA sebagai agunan kredit juga akan ditanggapi oleh Bank Indonesia (BI) dan Dirjen Bea dan Cukai dengan menyesuaikan sistem digital. Sementara implementasi kebijakan ini dalam sistem perbankan, akan dikoordinasikan oleh OJK.

Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan, pihaknya akan menyediakan instrumen baru untuk menampung DHE yang diwajibkan pemerintah untuk disimpan di dalam negeri sebesar 100 persen dalam kurun waktu satu tahun.

“Selama ini ada dua instrumen, jadi para eksportir setelah menerima reksus (rekening khusus) bisa menempatkan dalam deposito valas di bank, oleh bank deposito valas ini bisa di-redeposito ke BI. Ini yang kami sebut term deposit,” ungkap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Instrumen baru BI tersebut yaitu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor 6, 9, dan 12 dan bisa diperdagangkan di pasar valas dalam negeri. Kemudian instrumen baru lainnya adalah perluasan FX Swap.

Sumber: indonesia.go.id

Wamen ESDM: Usulan RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara Masih Digodok DPD RI

WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batubara masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Jadi begini, dari DPD itu ada inisiasi penyusunan undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang kelanjutan hilirisasi. Sementara itu, kelanjutan hilirisasi harus melihat regulasi yang lain. Dalam penyempurnaan Undang-Undang Minerba, sudah ada prioritas untuk pilihan usaha dalam rangka hilirisasi,” kata Yuliot dalam Rapat Kerja antara Kementerian ESDM dan Komite II DPD RI, Senin (24/2).

Terkait urgensi dari RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara ini, Yuliot menegaskan perlu dipastikan substansi yang akan diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.

“Kita harus lihat lagi secara substansi apa yang diatur. Ini kan secara substansi belum disampaikan ke pemerintah. Jadi nanti dari substansi, kita harus memetakan regulasi yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih,” tutur Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot bilang, pengaturan dalam RUU ini harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari wilayah usaha, izin usaha, hilirisasi, hingga industrialisasi. Menurutnya, keberlanjutan hilirisasi perlu dipastikan sampai tahap mana industrialisasi akan berjalan.

Saat ini, pembahasan mengenai substansi RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara belum dibahas antara DPD dan Kementerian ESDM. Proses penggodokan lebih lanjut masih menunggu kajian yang dilakukan oleh DPD RI sebelum disampaikan ke pemerintah untuk pembahasan lebih lanjut.

Sumber: industri.kontan.co.id

ESDM Mulai Petakan Proyek Hilirisasi yang Akan Dibiayai Danantara

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memetakan sejumlah proyek hilirisasi mineral —seperti nikel, bauksit, dan tembaga— yang berpotensi dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Danantara ini fokus hilirisasinya kan harus dipetakan terlebih dahulu. Mana yang nilai tambahnya terbesar, ya nanti kita akan masuk demi cepatnya pengembalian dana yang diinvestasikan,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Gedung DPD RI, Senin (24/2/2025).

Dia menuturkan saat ini terjadi peningkatan kebutuhan di dalam negeri seperti nikel dan bauksit. Untuk itu, pemerintah akan memperhitungkan nilai tambah bagi masing-masing komoditas mineral, sebelum menentukan proyek mana yang akan menjadi prioritas pendanaan dari Danantara.

Perhitungan tersebut, kata Yuliot, mencakup kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk balik modal investasi dari lembaga yang baru disahkan pada 24 Februari 2025 itu. Menurutnya, proyek hilirisasi yang tidak memiliki nilai tambah terlalu tinggi akan cenderung lama untuk balik modal.

Syarat dan Ketentuan

Terkait dengan syarat dan ketentuan suatu proyek hilirisasi untuk bisa memperoleh pendanaan dari Danantara, Yuliot menyampaikan kriterianya sedang disusun oleh Danantara.

Meskipun berbeda instansi, Yuliot menyatakan, Kementerian ESDM siap untuk membantu proses penyusunan kriteria proyek hilirisasi yang sesuai dengan pendanaan Danantara.

“Ini kan baru pendahuluan, baru peluncuran, jadi nanti kami dari Kementerian ESDM siap untuk mendukung itu,” ucapnya.

Dia menambahkan Kementerian ESDM telah melakukan konsolidasi dengan Kepala Danantara — yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi— Rosan Perkasa Roeslani untuk mengacu pada peta jalan hilirisasi yang telah disiapkan pemerintah.

Dari peta jalan tersebut, nantinya akan dipilah sejumlah proyek yang akan menjadi prioritas untuk dieksekusi dalam waktu dekat.

“Terkait dengan pembiayaan, mungkin itu pembiayaan dari Danantara, ya mungkin juga kerja samanya dengan investor,” imbuhnya.

Pada saat rapat bersama DPD hari ini, Yuliot mengatakan pemerintah menargetkan program hilirisasi ke depannya dapat mendatangkan investasi sekitar US\$618 miliar, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai US\$235,9 miliar.

Adapun, target ekspor dari program hilirisasi diharapkan mencapai US\$857,9 miliar.

Dia mengelaborasi, sebagian besar atau 80% dari proyek hilirisasi yang digagas pemerintah masih berkuat di sektor mineral dan batu bara, sedangkan 10% dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Sisanya, hilirisasi akan dikontribusikan dari sektor perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.

“Jadi kita mengharapkan seluruh program hilirisasi ini juga akan lebih mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri, terutama yang ada di daerah-daerah,” ujar Yuliot.

Adapun, ketika peresmian Danantara pagi ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan gelombang pertama investasi senilai US\$20 miliar dari Danantara akan diprioritaskan untuk 20 proyek strategis.

Sebanyak 20 proyek tersebut tersebar untuk sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan. (wdh)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)